

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan dalam menggunakan teknologi administrasi di tingkat pemerintah Kecamatan di Indonesia masih menjadi persoalan dibandingkan tingkat kabupaten maupun provinsi yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif karena kebijakan dalam penggunaan teknologi administrasi dapat membantu kinerja aparatur pemerintah Kecamatan. Hipotesis seperti itu secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan dimana berbagai tuntutan dari masyarakat sebagai tanda ketidakpuasan mereka sehari-hari banyak kita lihat contohnya kinerja aparatur kecamatan dalam ketepatan waktunya memberikan KTP dan KK kepada masyarakat setempat. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan dalam pemerintah itu sendiri.

Kelancaran kinerja aparatur kecamatan dalam pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk adalah tanggung jawab dari kinerja aparatur kecamatan yang ada di kota Bandung, Rasa puas masyarakat dalam pelayanan akan terpenuhi apabila ketika apa yang dikerjakan oleh aparatur Kecamatan sesuai dengan yang masyarakat harapkan selama ini, karena dalam pelayanan tersebut terdapat 3 unsur pokok yaitu biaya yang relative murah, waktu untuk mengerjakan relative cepat, dan mutu yang diberikan relatif lebih bagus.

Dalam hal ini Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebagai institusi terkait mempunyai tugas salah satunya melayani perekaman, pencetakan E-KTP dan KK (Kartu Keluarga) menggunakan seperangkat teknologi administrasi berupa alat-alat perekaman, printer, komputer, sidik jari, kamera dan termasuk teknologi sofwerenya berupa aplikasi dan datanya ditransfer ke Dinas Catatan Sipil Kota Bandung.

Salah satu Kinerja Aparatur Pemerintah yang perlu diberikan perhatian dalam kebijakan penggunaan teknologi adminitrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah Kecamatan. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah atau disebut Aparatur Sipil Negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, Kecamatan mengalami banyak masalah salah satunya Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dalam pemberian KK dan KTP yang kurang tepat waktu dalam mengerjakan KTP dan KK selain itu banyak kesalahan juga dalam entry data tersebut padahal seperangkat teknologi administrasi yang ada di Kecamatan tersebut sudah tersedia. Permasalahan tersebut bisa dilihat pada Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2016

Tabel I.I

Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2016

BULAN	KTP TEPAT WAKTU	KTP TIDAK TEPAT WAKTU	KTP YANG DILAYANI	% KTP TEPAT WAKTU	KK TEPAT WAKTU	KK TIDAK TEPAT WAKTU	KK YANG DILAYANI	% KK TEPAT WAKTU
1	2	3	4 = 2+3	5= 2/4*100%	6	7	8= 6+7	9= 6/8*100%
JAN	-	991	1038	-	354	59	413	85.71
FEB	-	1882	1899	-	572	34	606	94.38
MAR	-	1470	1579	-	572	33	607	94.23
APR	-	1546	1576	-	588	0	588	100.00
MEI	-	2113	2147	-	587	14	601	99.82
JUN	-	676	676	-	428	52	480	89.16
JUL	-	571	571	-	306	27	333	91.89
AGU	-	1.927	1927	-	537	27	564	95.21
SEP	-	6.138	6.138	-	864	21	885	97.74
OKT	-	1489	1489	-	489	6	495	96.96
NOV	-	771	771	-	446	10	456	97.80
DES	-	517	517	-	236	9	245	96.32
JUMLAH	-	20091	20091	-	5979	292	6271	95.34
$\frac{\sum_{i=1}^2 \text{Persentase jenis pelayanan}}{2}$							=	95.34%

Sumber : Rekapitulasi Laporan kinerja Instansi (LKIP) Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2016

Dari data diatas diketahui jumlah KTP yang dilayani 20091 dan KK 6271 namun dalam data tersebut diketahui juga permasalahan bahwa jumlah pelayanan administrasi kependudukan (KK/ KTP) tidak tepat waktu dapat diidentifikasi dari 2 (dua) permasalahan, yaitu faktor perangkat pendukung (*tools*) dan manusia (*human error*). Faktor *tools* yaitu perangkat komputer penunjang yang sering mengalami gangguan. Sedangkan faktor manusia (*human error*) yaitu sering terjadinya kesalahan entry data oleh operator. Dari jumlah pelayanan KTP 20091 semuanya tidak tepat waktu disebabkan persediaan keping KTP yang dari Dinas Kependudukan Catatan sipil tidak ada. Sedangkan penyebab KK tidak tepat waktu

133 disebabkan faktor *tools*, 105 merupakan gagal cetak (*human error*) dan 57 disebabkan faktor lainnya. Selain data ketepatan waktu dalam pencetakan KK dan KTP, Data Perbandingan Persentase pelayanan Administrasi Kependudukan tepat waktu Tahun 2016 dengan tahun 2015 dan 2014 menggambarkan Data permasalahan ketidak stabilan kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Berikut data tersebut :

Tabel I.2

**Perbandingan Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan
Tepat Waktu Tahun 2016 Dengan Tahun 2015 Dan Tahun 2014**

1.	Layanan	2016	2015	2014
2.	KTP	0	95.47	99.18
3.	KK	95,34	94.95	98.69

Sumber : Rekapitulasi laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung tahun 2016.

Berdasarkan Data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah pelayanan administrasi kependudukan yang dilayani oleh Kecamatan Ujung berung sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebanyak 26070 yang terdiri dari pelayanan administrasi kependudukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 20091 yang dilayani tidak tepat waktu, sedangkan administrasi kependudukan KK (Kartu Keluarga) yang dilayani 5979, yang dilayani tepat waktu sebanyak 5684. Hasil tersebut menurun bila dibandingkan pada tahun 2014 yang capaian kinerjanya mencapai 98,69% mengalami penurunan, tetapi bila dibandingkan dengan 2015 capaiannya 95.21 mengalami sedikit kenaikan selisih sebesar 0. 13 %. Jelaslah

bahwa kinerja aparaturnya kecamatan Ujung Berung Kota Bandung masih belum optimal dalam penggunaan teknologi administrasinya, padahal dengan adanya teknologi administrasi seharusnya dapat menunjang keberhasilan dalam kinerja Aparatur. Karena adanya Kinerja yang kurang efektif maka dalam tabel indeks kepuasan masyarakat menggambarkan rasa puas masyarakat yang belum optimal sepenuhnya walaupun dalam kategori nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) baik. Berikut data tersebut :

Tabel 1.3

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 Dan Tahun 2017

No.	Tahun	Triwulan	Nilai IKM
1.	2017	III	83, 31(Baik)
		II	84 (Baik)
		I	83, 248 (Baik)
2.	2016	-	69 (Baik)

Sumber : Rekapitulasi Laporan IKM tahun 2016 dan 2017 Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, diolah oleh penulis.

Dari data diatas diketahui bahwa nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2016 adalah 69, nilai IKM tahun 2017 triwulan 1 adalah 83, 248 mengalami kenaikan, nilai IKM tahun 2017 triwulan 2 adalah 84 mengalami kenaikan juga, sedangkan nilai IKM tahun 2017 triwulan III adalah 83, 3 yaitu mengalami penurunan. Disini terlihat bahwa kepuasan masyarakat sedikit berkurang terhadap Kinerja Aparatur yang diberikan kepada masyarakat.

Kelancaran pelaksanaan Kinerja Aparatur Kecamatan sangat tergantung pada profesionalisme dari setiap pegawai yang melayani dan fasilitas teknologi administrasi yang diterapkan guna meningkatkan kelancaran roda pemerintahan.

Dari hasil data yang didapatkan, bahwa memberikan kebijakan dalam penggunaan teknologi administrasi yang efektif dan efisien sangatlah penting agar menunjangnya keberhasilan dalam kinerja aparatur Kecamatan. Karena pada hakikatnya kinerja pegawai selain harus bersikap profesional tetapi tergantung pula pada fasilitas teknologi yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang didapatkan bahwa variabel Y atau Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung masih belum optimal ditandai oleh :

1. *Input* (Masukan) : permasalahan yang berkaitan dengan *input* adalah bahwa waktu yang digunakan dalam Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung banyak yang tidak tepat waktu sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi tidak efektif. Permasalahan ini bisa dilihat pada Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat waktu pada tahun 2016, di dalam Data tersebut terlihat pembuatan E-KTP yang berjumlah 20091 semuanya tidak tepat waktu sedangkan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang tidak tepat waktu berjumlah 292 dari keseluruhannya 6271.
2. *Process* (Proses) : permasalahan yang berkaitan dengan proses adalah bahwa rata - rata yang diperlukan untuk memproduksi barang dan menghasilkan layanan jasa kurang efektif ditandai dengan banyaknya ketidak tersediaan

kepingan untuk pembuatan KTP yang pada akhirnya mengakibatkan ketidaktepatan waktu dalam memberikan E-KTP kepada masyarakat.

3. *Output* (Keluaran) : permasalahan yang berkaitan dengan keluaran adalah bahwa jumlah produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan pemasukan wajib E-KTP dan KK (Kartu Keluarga) yang dilayani, yang seharusnya pada tahun 2016 wajib KTP yang harus selesai berjumlah 20091 dan KK (Kartu Keluarga) yang harus selesai berjumlah 6271 namun pada tahap ini tidak semuanya selesai.
4. *Outcomes* (Hasil) : permasalahan yang berkaitan dengan Hasil adalah bahwa tingkat kualitas produksi dan Jasa yang dihasilkan kurang baik contohnya masih banyaknya kesalahan dalam entry data, salah penulisan identitas seseorang dalam E-KTP dan KK sehingga terjadi pencetakan ulang kembali yang berakibatkan lamanya proses kinerja pegawai, disini juga dilihat bahwa produktivitas pegawai kurang efektif dan efisien.
5. *Benefits* (Manfaat) permasalahan yang berkaitan dengan manfaat sesuai dengan indikatornya bahwa tingkat kepuasan masyarakat kecamatan Ujung Berung berkurang pada tahun 2017.
6. *Impact* (Dampak) permasalahan yang berkaitan dengan Dampak adalah bahwa dampak yang terjadi berakibat banyaknya keluhan di masyarakat karena keterlambatan Aparatur dalam memberikan e – KTP dan KK (Kartu Keluarga).

Dari keterangan yang dikemukakan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan selanjutnya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam

bentuk skripsi dengan judul “ **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEKNOLOGI ADMINISTRASI TERHADAP KINERJA APARATUR KECAMATAN UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG** ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut pada implementasi kebijakan teknologi administrasi dan kinerja aparatur Kecamatan Ujung Berung kota Bandung diantaranya :

1. Kinerja pemerintah itu diukur dengan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan data yang saya dapatkan dari kecamatan Ujung Berung nilai indeks kepuasan masyarakat turun pada tahun 2017.
2. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari kecamatan Ujung Berung berkenaan dengan implementasi kebijakan teknologi administrasi yaitu ketidak tepatan target pembuatan KTP dan KK sampai saat ini padahal kecamatan lain juga ada.
3. Kinerja Aparatur masih Kurang optimal padahal teknologi administrasinya sudah lumayan kumplit.
4. Pegawai kurang teliti dalam menginput data sehingga terjadi banyak kesalahan dalam pencetakan KTP dan KK.
5. SDM belum sepenuhnya mengoptimalkan fasilitas teknologi yang ada dikecamatan tersebut. .
6. Pegawai kurang teliti dalam menggunakan teknologi administrasi seperti gagal cetak dalam kasus Kartu Keluarga sehingga mengakibatkan tidak tepat waktu dalam memberikan KK dan KTP kepada masyarakat setempat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Praktek terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Pengetahuan terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh Nilai Guna terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh Aset terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh Meningkatkan Kesejahteraan manusia terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung?

Seberapa besar pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Praktek, Kompetensi Pengetahuan, Nilai Guna, Aset, Meningkatkan Kesejahteraan Manusia secara simultan (bersama – sama) dalam Implementasi Kebijakan Teknologi Administrasi terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujungberung Kota Bandung?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti guna mengetahui dan mempelajari:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Praktek terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompetisi Pengetahuan terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Guna terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Aset terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Meningkatkan Kesejahteraan manusia terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ilmu Pengetahuan dan Praktek, Kompetisi Pengetahuan, Nilai Guna, Aset, Meningkatkan Kesejahteraan Manusia secara simultan (bersama – sama) dalam Implementasi Kebijakan Teknologi Administrasi terhadap Kinerja Aparatur Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

1.5 Manfaat Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja.
- b. Dapat dijadikan sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara dan sebagai

sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah daya pikir dan pengembangan wawasan dalam rangka menerapkan hasil study kebijakan publik yang dikaitkan dengan Kinerja Aparatur Pemerintah.
- b. Dapat dijadikan alat penyelesaian masalah apabila terjadi masalah dalam organisasi tentunya apabila berhubungan dengan Kinerja Aparatur Kecamatan.
- c. Bagi lembaga terkait diharapkan dapat memperkaya teori-teori pengembangan ilmu administrasi negara serta dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam peneliti.

1.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi, secara ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu pendapat para ahli dibidangnya dan kebenarannya. Karena itu dalam membahas implementasi kebijakan teknologi administrasi informasi administrasi dan kinerja aparatur/pegawai penulis mengemukakan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis mengenai teori dari administrasi negara, implementasi kebijakan teknologi informasi administrasi dan kinerja aparatur/pegawai. Pengertian dari administrasi negara dan kinerja aparatur/pegawai variable Y diutarakan oleh para ahli dibawah ini sebagai berikut:

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Siagian dalam Silalahi (2011:9) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pengertian administrasi negara menurut Pffifner dan Presthus dalam Syafiie (2011:31), mendefinisikan administrasi negara sebagai berikut :

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan.
3. Secara ringkas. Administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahankecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Jadi, penulis menyimpulkan administrasi negara adalah seluruh proses kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintah atau berhubungan dengan kegiatan pemerintah dalam mencapai tujuan negara.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning*. (Mahsum dalam Sembiring 2012:81).

Selanjutnya, Bernardin dan Russel dalam Sembiring (2012:81) memberikan defisini tentang kinerja sebagai berikut, kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diproduksi dari fungsi-fungsi jabatan dan kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Pencapaian kinerja merupakan suatu proses yang memerlukan sejumlah sumber daya (*resources*) seperti uang, orang, alat, waktu dan sebagainya. Dengan demikian yang dimaksud dengan kinerja atau *ferformance* adalah tingkat

pencapaian kebijakan/program/ kegiatan dengan menggunakan sejumlah sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil kerja (*output*) dari suatu proses (*konversi*) tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber sumber daya, data dan informasi, kebijakan, dan waktu tertentu yang digunakan disebut sebagai masukan (*input*). Umpan balik (*feed back*) merupakan komentar dari konsumen atas *output* yang didistribusikan yang berguna bagi perubahan atau perbaikan *input* berikutnya, sehingga proses tersebut merupakan siklus atau sistem. Sembiring (2012:82)

Sedangkan penilaian kinerja Menurut Garpersz dalam Sembiring (2012:89-90) bahwa “penilaian kinerja pemerintahan secara komprehensif dapat menggunakan sistem manajemen kinerja “*Balanced Scorecard* yaitu bagaimana proses-proses dalam organisasi memberikan keunggulan sehingga mampu bersaing untuk mencapai kesuksesan organisasi pemerintah yang terdiri dari perspektif pelanggan, perspektif proses internal perspektif finansial dan perspektif pembelajaran organisasi secara terus menerus, sehingga organisasi mampu mempertahankan kinerja bahkan meningkatkan kinerjanya. Pada sektor pemerintah, maka 4 perspektif tersebut disesuaikan dengan sifat sifat yang berlaku pada birokrasi pemerintah.

Dalam variabel Y yaitu Kinerja Aparatur, peneliti memilih Dimensi dari Mahsun yang dikutip Sembiring (2012:101-102) yaitu :

Yang mencakup pengukuran kinerja pemerintah mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan indikator kinerja pemerintahan daerah meliputi :

1. Indikator masukan (*inputs*), misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
 - c. Jumlah infra sruktur yang ada
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*process*), misalnya :
 - a. Kerataan pada peraturan perundangan
 - b. Rata – rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator keluaran (*output*), misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
 - b. Ketetapan dalam memproduksi barang dan jasa
4. Indikator hasil (*outcomes*), misalnya :
 - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
5. Indikator manfaat (*benefits*) :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat
6. Indikator dampak (*impact*), misalnya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Selain peneliti sajikan pengertian mengenai Kinerja aparatur peneliti juga memaparkan pengertian tentang implementasi kebijakan teknologi administrasi atau teori dari variabel X. Pengertian- pengertiannya adalah sebagai berikut :

Bardach dalam Agustino (2014 : 138) membuat pernyataan, yaitu : Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata- kata dan slogan- slogan yang kedengarannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.

Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan, Meter dan Horn dalam Agustino (2014 :139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat – pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sedangkan pengertian teknologi dari perspektif masyarakat umum, teknologi merujuk kepada alat-alat modern, canggih. Misalnya pesawat terbang, kapal laut, computer, internet, handphone, mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, satelit. Perspektif masyarakat umum tidaklah salah karena dalam pengertian teknologi memang termasuk didalamnya hal-hal yang telah disebutkan diatas.

Kast dan Rozeinweig dalam Akadun (2009:10) mengemukakan bahwa dalam arti sempit, istilah teknologi berkaitan dengan teknologi mesin, mekanisme alat-alat produksi barang dan jasa, penggantian tenaga manusia. Pandangan mekanistik ini menekankan teknologi yang dapat dilihat, penekanan pada hal-hal fisik, seperti pemahaman teknologi oleh masyarakat umum. Teknologi adalah penerapan pengetahuan untuk pelaksanaan tugas atau kegiatan-kegiatan tertentu secara lebih efektif.

Menurut *technology Atlas Project* (1989) dalam Akadun (2009:11), teknologi terdiri dari perangkat keras (*hardware*), organisasi (*orgaware*), informasi (*inforware*), serta manusianya (*humanware*). Berdasarkan pendapat ini teknologi bukan hanya perangkat keras melainkan setiap kegiatan organisasi, informasi, *mind set* manusia merupakan teknologi juga.

Sedangkan untuk memahami pengertian teknologi informasi, Wikipedia bahasa Indonesia dalam Akadun (2009:114) menjelaskan sejarah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui

bahasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bahasa adalah teknologi. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan orang lain. Akan tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapannya itu selesai maka informasi yang berada ditangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama. Selain itu jangkauan suara yang terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegrasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih kuat.

Berdasarkan pengertian diatas maka Teknologi Informasi Administrasi di atas adalah pada dasarnya segala usaha (baik dengan penggunaan alat, proses, dan mekanisme kerja, serta pengetahuan) agar peroses kerja sama antar dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian dengan lebih berkualitas, lebih proporsional, lebih efektif, dan lebih efisien.

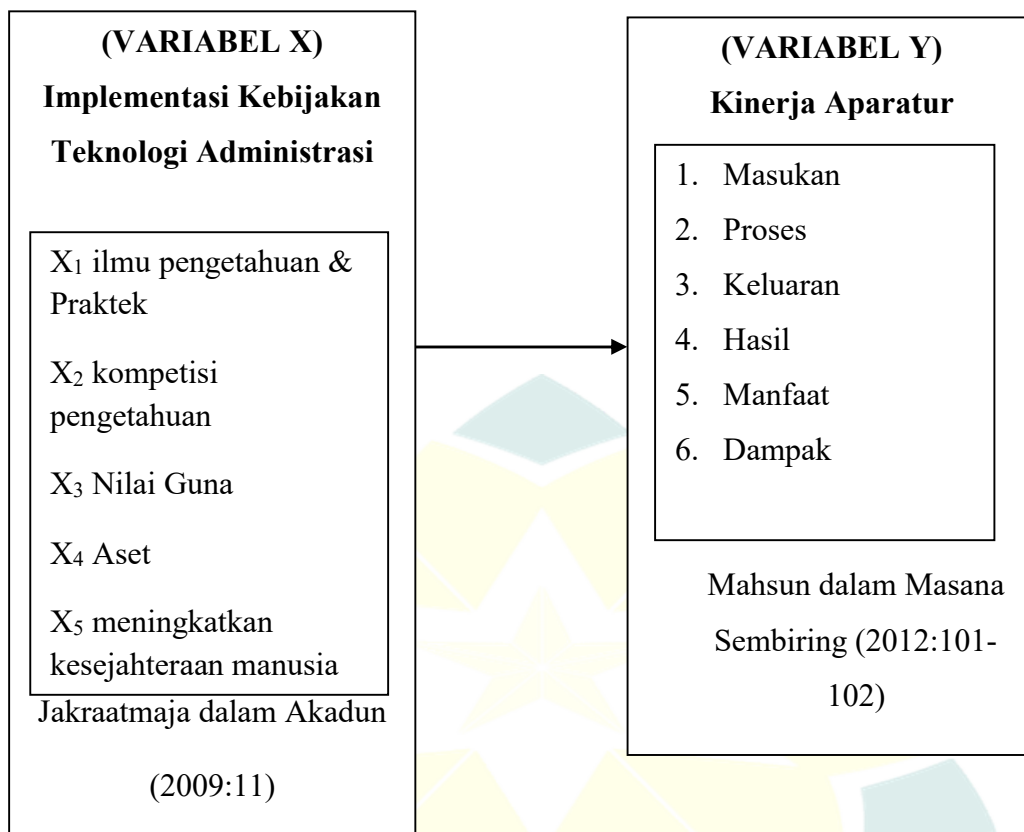
Sedangkan dimensi Teknologi Administrasi X, peneliti mengambil dari Tjakraatmaja dalam Akadun (2009 : 11) :
Menurut Tjakraatmaja dalam Akadun (2009:11) dimensi teknologi administrasi.

Menurutnya teknologi adalah :

- a. Ilmu pengetahuan dan praktek/ percobaan merupakan persyaratan untuk tumbuh dan berkembangnya teknologi. Teknologi yang dikuasai akan makin berkembang jika sudah terbagi atau terpakai.

- b. Teknologi dapat berwujud maya berupa kompetensi pengetahuan yang melekat pada diri manusia, dapat berwujud fisik (berupa pengetahuan eksplisit) yang melekat pada mesin dan peralatan serta informasi yang diwadahi oleh sistem dan organisasi. Teknologi dibutuhkan sebagai instrument pewujud dan pelipat ganda profesi potensi insani.
- c. Teknologi tidak memberikan nilai guna jika tidak diterapkan (tidak terbagi dan terpakai secara tepat guna).
- d. Sebagai salah satu asset, teknologi dapat ditemukan, dikembangkan dibeli, dijual, dicari atau menjadi tidak menilai guna jika teknologi yang kita miliki kadaluarsa.
- e. Umumnya (dari pandangan fositif) teknologi digunakan untuk menciptakan kesejahteraan manusia atau meningkatkan kualitas hidup manusia, baik kehidupan dari aspek material maupun non material (kemanusiaan).

Dalam definisi yang telah dikemukakan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa salah satu penunjang kinerja aparatur Kecamatan adalah adanya implementasi kebijakan teknologi administrasi yang diterapkan di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis dimana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. **H₀** (Hipotesis Nol) : Tidak terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan teknologi administrasi terhadap kinerja aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

H_a (Hipotesis Alternatif) : Terdapat pengaruh antara implementasi kebijakan teknologi administrasi terhadap kinerja aparatur Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung.

